

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021

UNAUDITED

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 31 DESEMBER 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Bengkulu, 20 Januari 2022

Sekretaris

Endri Novian, SE

NIP. 197511092003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	6
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	6
A.3 Basis Akuntansi	6
A.4 Dasar Pengukuran	6
A.5 Kebijakan Akuntansi	6
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	11
B.2 Belanja	12
B.3 Belanja Pegawai	13
B.4 Belanja Barang	13
B.5 Belanja Modal	14
B.6 Belanja Bantuan Sosial	15
B.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	17
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	17
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	17
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	17
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	18
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	18
C.7 Piutang Bukan Pajak	18
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	18
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	19
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	19
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	19
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	20
C.13 Persediaan	20
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	20
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	20
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	21
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	21
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	21
C.19 Tanah	22
C.20 Tanah Belum Diregister	22
C.21 Peralatan dan Mesin	22
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	22
C.23 Gedung dan Bangunan	23
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	23
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	23
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	24
C.27 Aset Tetap Lainnya	24

C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	24
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	24
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	25
C.32	Aset Tak Berwujud	25
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	25
C.34	Aset Lain-lain	26
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	26
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	27
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	27
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	27
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	27
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	28
C.42	Uang Muka dari KPPN	28
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	28
C.44	Ekuitas	29
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	29
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	30
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	30
D.2	Beban Pegawai	30
D.3	Beban Persediaan	30
D.4	Beban Barang dan Jasa	31
D.5	Beban Pemeliharaan	31
D.6	Beban Perjalanan Dinas	32
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	32
D.8	Beban Bantuan Sosial	32
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	33
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	33
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	33
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	34
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	34
D.14	Pos Luar Biasa	34
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	34
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
E.1	Ekuitas Awal	35
E.2	Surplus (Defisit) LO	35
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	35
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	35
E.5	Transaksi Antar Entitas	36
E.6	Ekuitas Akhir	37
E.7	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	37
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	38
VI.	Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	11
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	11
3	Perbandingan PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	12
4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2021	12
5	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	13
6	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	13
7	Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	14
8	Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	14
9	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	14
10	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	15
11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	15
12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	15
13	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	16
14	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	17
15	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	17
16	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	17
17	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	18
18	Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	18
19	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	18
20	Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	18
21	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021	19
22	Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	19
23	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	19
24	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	19
25	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	20
26	Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	20
27	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	20
28	Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	21
29	Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	21
30	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	21
31	Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2021	22
32	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2021	25
33	Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2021	25
34	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
35	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	27
36	Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan	27
37	Rincian Hibah Yang Belum Disahkan	27
38	Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut	28
39	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut	28
40	Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :	28
41	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut	28
42	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	30
43	Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	30

44	Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	31
45	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	31
46	Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	32
47	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	32
48	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	32
49	Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	33
50	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	33
51	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	33
52	Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	33
53	Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	34
54	Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020	34
55	Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2021 dan 2020	34
56	Rincian Koreksi Nilai Persediaan	35
57	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021	36
58	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021	36
59	Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021	36
60	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021	36
61	Rincian Transfer Keluar Tahun 2021	37
62	Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :	37

DAFTAR GRAFIK

1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

12

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Bengkulu, 20 Januari 2022

Sekretaris

Endri Novian, SE

NRP. 197511092003121001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp60,353,620 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp60,353,620 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19,452,286,463 atau mencapai 99.03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp19,642,359,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021 . Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp35,109,252,320 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp50,579,790; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp35,058,672,530 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17,553,066 dan Rp35,091,699,254

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp60,353,620 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp20,132,733,045 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-20,072,379,425, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-20,072,379,425.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp35,752,026,236, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-20,072,379,425 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 19,413,252,443 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp35,092,899,254

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah ikut berperan aktif untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA***(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang***d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

*Aset Lainnya***e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2021	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,000,000	-
Jumlah Pendapatan	6,000,000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	19,301,502,000	16,301,502,000
Belanja Barang	3,195,947,000	3,269,857,000
Belanja Modal	71,000,000	71,000,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	22,568,449,000	19,642,359,000

Realisasi Pendapatan
Rp60,353,620

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp60,353,620 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Tinggi Bengkulu terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp60,353,620 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	60,353,620	-
Jumlah	-	60,353,620	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 160.20 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	60,353,620	23,195,339	160.20
Jumlah	60,353,620	23,195,339	160.20

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp60,353,620

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp60,353,620 dan Rp23,195,339. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 160.20 dari TA 2020 karena adanya Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang merupakan Denda atas pelaksanaan Kontrak Sewa Mesin Fotocopy karena adanya Adendum Kontrak terhadap keterlambatan pengiriman barang. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	60,353,620	23,195,339	160.20
Jumlah	60,353,620	23,195,339	160.20

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	24,477,120	17,195,340	42.35
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35,876,500	-	-
Jumlah	60,353,620	23,195,339	160.20

Realisasi Belanja
Rp19,452,286,463

B.2 Belanja

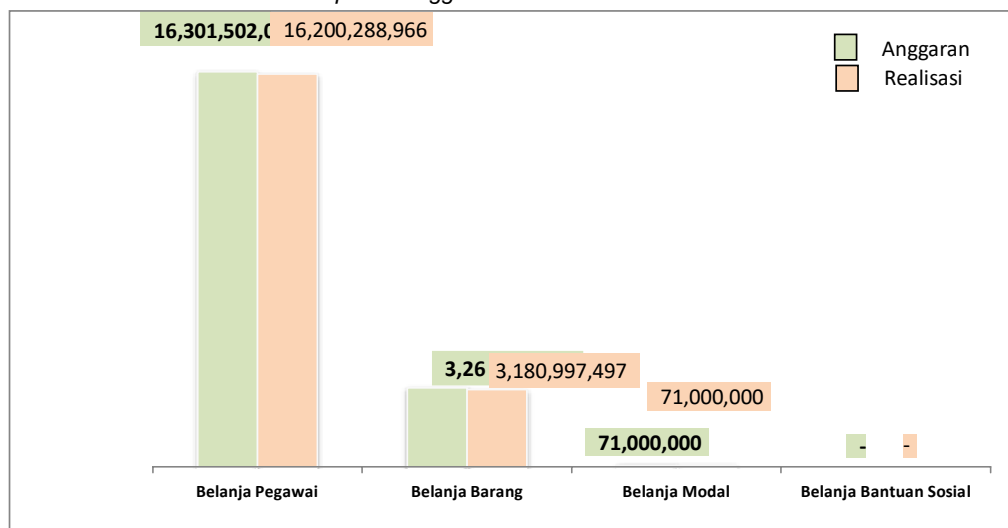
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp19,452,286,463 atau 99.03 % dari anggaran belanja sebesar Rp.19,642,359,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2021

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	16,301,502,000	16,200,288,966	99.38
Belanja Barang	3,269,857,000	3,180,997,497	97.28
Belanja Modal	71,000,000	71,000,000	100.00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	19,642,359,000	19,452,286,463	99.03

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 17.41% karena banyak Hakim Tinggi yang mutasi ke Wilayah lain sehingga menyebabkan menurunnya realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	16,200,288,966	20,436,416,552	(20.73)
Belanja Barang	3,180,997,497	3,091,536,012	2.89
Belanja Modal	71,000,000	25,000,000	184.00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	19,452,286,463	23,552,952,564	(17.41)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp16,200,288,966

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16,200,288,966 dan Rp20,436,416,552. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami penurunan sebesar 20.73 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan karena banyak Hakim Tinggi yang mutasi ke Wilayah lain sehingga menyebabkan menurunnya realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4,243,160,580	4,809,510,540	(11.78)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	49,340	53,487	(7.75)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	350,776,130	398,280,820	(11.93)
Belanja Tunj. Anak PNS	51,580,194	64,102,280	(19.53)
Belanja Tunj. Struktural PNS	93,870,000	92,610,000	1.36
Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,115,830,000	11,261,265,000	(27.93)
Belanja Tunj. PPh PNS	1,624,644,048	2,095,524,808	(22.47)
Belanja Tunj. Beras PNS	176,060,100	172,598,700	2.01
Belanja Uang Makan PNS	577,734,000	660,237,000	(12.50)
Belanja Tunjangan Umum PNS	51,755,000	55,105,000	(6.08)
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	916,200,000	837,000,000	9.46
Jumlah Belanja kotor	16,201,659,392	20,446,287,635	(20.76)
Pengembalian Belanja Pegawai	1,370,426	9,871,083	(86.12)
Jumlah Belanja	16,200,288,966	20,436,416,552	(20.73)

Realisasi Belanja Barang
Rp3,180,997,497

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3,180,997,497 dan Rp3,091,536,012. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 2.89% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh karena adanya penambahan pagu anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp141.300.000,- khususnya untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor untuk, meningkatnya realisasi Belanja Jasa dan Belanja Perjalanan Dalam

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	751,766,678	757,234,436	(0.72)
Belanja Barang Non Operasional	20,160,550	80,532,000	(74.97)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	104,996,685	109,449,270	(4.07)
Belanja Jasa	1,133,193,469	1,102,857,927	2.75
Belanja Pemeliharaan	774,355,052	664,670,936	16.50
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	397,089,143	377,591,443	5.16
Jumlah Belanja Kotor	3,181,561,577	3,092,336,012	2.89
Pengembalian Belanja	564,080	800,000	(29.49)
Jumlah Belanja	3,180,997,497	3,091,536,012	2.89

Realisasi Belanja Modal
Rp71,000,000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp71,000,000 dan Rp25,000,000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 184.00% dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh karena adanya peningkatan anggaran untuk Belanja Modal pada periode TA 2021 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71,000,000	25,000,000	184.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	71,000,000	25,000,000	184.00
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	71,000,000	25,000,000	184.00

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh karena tidak terdapat Belanja Modal Tanah yang dapat dijabarkan pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun sebelumnya.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp71,000,000

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp71,000,000 dan Rp25,000,000, mengalami kenaikan sebesar 184.00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya alokasi anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada periode Tahun Anggaran 2021 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71,000,000	25,000,000	184.00
Jumlah Belanja Kotor	71,000,000	25,000,000	184.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	71,000,000	25,000,000	184.00

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2020. Tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2020. Tidak terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2020. Tidak terdapat Belanja Modal Lainnya pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0*

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2020. Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Terjadi kesalahan administratif dalam proses Revisi POK DIPA Tahun Anggaran 2021 sehingga mengakibatkan terkoreksinya estimasi penerimaan pada Halaman III DIPA yang sebelumnya ada senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta rupiah) menjadi Rp.0,-.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dapat dijabarkan per 31 Desember 2021

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya.

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Tidak terdapat Belanja Dibayar Dimuka yang dapat dijabarkan pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5. Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Uang Muka Belanja yang dapat dijabarkan pada periode Tahun Anggaran 2021 inipun periode yang sama pada Tahun sebelumnya

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.7. Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang Bukan
Pajak Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Jenis	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan Rp50,579,790

C.13 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp50,579,790 dan Rp37,058,780. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Barang Konsumsi	43,013,000	28,377,600
Bahan untuk Pemeliharaan	7,566,790	8,681,180
Jumlah	50,579,790	37,058,780

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.14 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.4 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Debitur	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Debitur	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2021 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp28,332,813,000

C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp28,332,813,000 dan Rp28,332,813,000. Nilai Tanah tersebut tidak mengalami

kenaikan pada periode laporan Tahun Anggaran 2021 ini dibandingkan periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	28,332,813,000
Mutasi tambah :	
	-
Mutasi kurang :	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2021	28,332,813,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2021

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1,195	Jln. Seruni Kota Bengkulu	491,231,000
2	2,010	Jln. Batang Hari Kota Bengkulu	904,886,000
3	1,933	Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu	4,745,422,000
4	586	Jln. Basuki Rahmat Kota Bengkulu	1,480,378,000
-	-	-	-
Jumlah			28,332,813,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak terdapat Tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.20 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp4,505,405,268*

C.21 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp4,505,405,268 dan Rp4,416,479,668. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	4,416,479,668
Mutasi tambah:	
Pembelian	83,960,000
Transfer Masuk	4,148,100
Hibah (Masuk)	16,981,500
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	3,204,000
	-
Saldo per 31 Desember 2021	4,518,365,268
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(4,163,503,482)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	354,861,786

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Pembelian 1 Unit Mesin Absensi senilai Rp.5.500.000,-
- Pembelian 1 Unit LCD Infocus senilai Rp.4.560.000,-
- Pembelian 5 Unit Kursi Besi/Metal senilai Rp.11.550.000,-
- Pembelian 2 Unit AC Split senilai Rp.11.510.000,-
- Pembelian 3 Unit P.C Unit senilai Rp.36.630.000,-
- Pembelian 1 Unit Printer senilai Rp.1.250.000,-
- Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupa 1 Unit Network
- Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupa 1 Unit Hub
- Hibah Barang berupa 1 Unit AC Split senilai Rp.7.081.500,-
- Hibah Barang berupa 2 Unit Printer senilai Rp.9.900.000,-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Penghentian Aset dari Penggunaan berupa 1 Unit Sepeda Motor

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0*

C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan Bangunan
Rp9,498,083,000*

C.23 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9,498,083,000 dan Rp9,498,083,000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	9,498,083,000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2021	9,498,083,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(3,142,806,206)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	6,355,276,794

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat mutasi tambah Gedung dan Bangunan pada periode Tahun Anggaran 2021 ini

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak terdapat mutasi kurang Gedung dan Bangunan pada periode Tahun Anggaran

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0*

C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat aset berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada satker Pengadilan Tinggi

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak terdapat mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp28,680,950

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.28,680,950 dan Rp.28,490,950. Aset tetap tersebut Berupa koleksi buku-buku (Monografi) yang terdapat di perpustakaan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	28,490,950
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	190,000
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2021	28,680,950
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	28,680,950

Mutasi tambah/kurang:

Pengiriman 2 Buah Buku-Buku Hukum dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan di satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada periode Tahun Anggaran 2021. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2021	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp7,306,309,688

C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp7,306,309,688 dan Rp6,547,752,965. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4,505,405,268	(4,163,503,482)	341,901,786
2	Gedung dan Bangunan	9,498,083,000	(3,142,806,206)	6,355,276,794
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	28,680,950	-	28,680,950
Akumulasi Penyusutan		14,032,169,218	(7,306,309,688)	6,725,859,530

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada tidak terdapat Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Tahun Anggaran 2021 ini. Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
-		-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud Rp0

C.32 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang Aset Tak Berwujud yang dapat dijabarkan pada

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. tidak terdapat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan yang dapat dijabarkan pada periode Tahun Anggaran 2021 ini. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
 Mutasi tambah:	
	-
 Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

Aset Lain-lain
Rp3,204,000

C.34 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp3,204,000 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	
 Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3,204,000
 Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Akhir	3,204,000
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(3,204,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	(3,204,000)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya yaitu berupa 1 Unit Sepeda Motor

Mutasi Kurang

- Tidak terdapat mutasi kurang Aset Lainnya pada periode Tahun Anggaran 2021

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 3,204,000

C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp3,204,000 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	3,204,000	(3,204,000)	-
Total	3,204,000	(3,204,000)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp17,553,066

C.37 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp17,553,066 dan Rp13,146,197. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	913,410
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	17,553,066	12,232,787
Total	17,553,066	13,146,197

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

1. Beban Langganan Listrik Bulan Desember Tahun 2021 senilai Rp.17.074.404
2. Beban Langganan Telepon Bulan Desember Tahun 2021 senilai Rp.116.162,-
3. Beban Langganan PDAM Bulan Desember Tahun 2021 senilai Rp.362.500,-
Yang dibayarkan pada Bulan Januari Tahun 2022

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Tidak terdapat Rincian Utang yang Belum Ditagihkan yang dapat dijabarkan pada periode Tahun Anggaran 2021.

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.39 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Tidak terdapat Hibah yang Belum Disahkan pada periode Tahun Anggaran 2021.

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Tidak terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan di periode Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.41 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2020
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka yang perlu dijabarkan pada periode Tahun Anggaran 2021 ini.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.42 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Telah dilakukan SPM Nihil dan Pengembalian Sisa UP/TUP terhadap Pagu Anggaran Tahun 2021 sehingga tidak terdapat lagi sisa Uang Persediaan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran di akhir Tahun.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya yang dapat dijabarkan pada periode Tahun Anggaran 2021 ini.

Ekuitas
Rp35,091,699,254

C.44 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp35,091,699,254. dan Rp35,752,026,236. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 45 Catatan Penting Lainnya neraca

Tidak terdapat catatan penting lainnya Neraca yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Tahun Anggaran 2021 ini.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp60,353,620

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp60,353,620 dan Rp17,195,340. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 250.99. Hal tersebut disebabkan oleh adanya Pendapatan Sewa Rumah Dinas dan Pendapatan atas Denda Penyelesaian Kontrak Sewa Mesin Fotocopy. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	24,477,120	17,195,340.00	42.35
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	35,876,500	-	-
	-	-	-
Jumlah	60,353,620.00	17,195,340.00	250.99

Beban Pegawai
Rp16,199,375,556

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16,199,375,556 dan Rp20,434,809,410.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 20.73 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena di Tahun 2021 banyak Hakim Tinggi yang mutasi ke Wilayah lain sehingga menyebabkan menurunnya realisasi Belanja Pegawai. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	4,242,963,880	4,802,125,140	(11.64)
Beban Pembulatan Gaji PNS	48,874	53,174	(8.09)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	350,756,460	396,011,860	(11.43)
Beban Tunj. Anak PNS	51,580,194	64,102,280	(19.53)
Beban Tunj. Struktural PNS	93,870,000	91,845,000	2.20
Beban Tunj. Fungsional PNS	8,115,560,000	11,260,040,000	(27.93)
Beban Tunj. PPh PNS	1,624,644,048	2,094,994,256	(22.45)
Beban Tunj. Beras PNS	176,060,100	172,598,700	2.01
Beban Uang Makan PNS	577,037,000	660,934,000	(12.69)
Beban Tunjangan Umum PNS	50,655,000	55,105,000	(8.08)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	916,200,000	837,000,000	9.46
	-	-	-
Jumlah	16,199,375,556	20,434,809,410	(20.73)

Beban Persediaan
Rp69,242,600

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp69,242,600 dan Rp56,115,450

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 23.39 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena meningkatnya permintaan terhadap barang persediaan guna terlaksananya proses administrasi perkantoran pada periode Tahun Anggaran 2021 ini dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	69,242,600	56,115,450	23.39
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	69,242,600.00	56,115,450	23.39

*Beban Barang dan Jasa
Rp1,908,676,976*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,908,676,976 dan Rp1,925,682,315.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.88 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena menurunnya realisasi Belanja Jasa Profesi dan Beban Bahan sebab pelaksanaan Bimtek yang banyak diselenggarakan melalui zoom pada periode Tahun Anggaran 2021 ini dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	449,022,443	465,841,221	(3.61)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,061,600	15,931,800	0.81
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	75,580,000	80,850,000	(6.52)
Beban Barang Operasional Lainnya	190,569,635	153,624,295	24.05
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19,969,000	34,991,120	(42.93)
Beban Bahan	20,160,550	66,902,000	(69.87)
Beban Langganan Listrik	196,492,762	176,585,971	11.27
Beban Langganan Telepon	1,604,986	2,177,408	(26.29)
Beban Langganan Air	3,897,000	3,623,500	7.55
Jumlah	1,908,676,976	1,925,682,315.00	(0.88)

*Beban Pemeliharaan
Rp796,588,047*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp796,588,047 dan Rp697,955,666.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 14.13 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena adanya penambahan pagu anggaran Pemeliharaan yang digunakan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	430,776,828	342,670,382	25.71
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	99,328,500	98,931,525	0.40
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244,249,644	223,069,029	9.50
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	22,233,075	33,284,730	(33.20)
	-	-	-
Jumlah	796,588,047	697,955,666	14.13

Beban Perjalanan Dinas
Rp397,089,143

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp397,089,143 dan Rp377,591,443

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5.16 persen disebabkan oleh karena meningkatnya alokasi anggaran untuk Beban Perjalanan Dinas di Tahun 2021 dan terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis menyebabkan meningkatnya penyerapan anggaran Beban Perjalanan Biasa pada Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	185,774,143	97,711,443	90.13
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000	4,050,000	85.19
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	203,815,000	275,830,000	(26.11)
	-	-	-
Jumlah	397,089,143.00	377,591,443	5.16

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh karena tidak terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada periode Tahun Anggaran 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar 0,00 disebabkan oleh karena tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2021 maupun periode yang sama pada Tahun sebelumnya. Rincian Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp761,760,723

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp761,760,723 dan Rp792,951,320.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	233,460,520	264,651,117	(11.79)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	528,300,203	528,300,203	-
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	761,760,723	792,951,320	(3.93)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	761,760,723	792,951,320	(3.93)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Rp0

D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5,989,999

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	5,999,999.00	(100)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	(10,000.00)	(100)
Jumlah	-	5,989,999	(100)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non Operasional
Lainnya Rp0

D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp179,540.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	1,617,370.00	(100.00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(1,437,830.00)	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	179,540	(100.00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada periode Tahun Anggaran 2021 ini.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.35,752,026,236.00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.35,752,026,236.00 dan Rp.37,116,794,339.00

*Defisit LO Rp.-
20,072,379,425.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-20,072,379,425.00 dan Rp.-24,261,740,725.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-631,154,603 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-631,154,603. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. adalah merupakan perubahan terhadap Tipe Rumah Dinas milik Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu dari sebelumnya Rumah Dinas Tipe C sebanyak 8 unit, menjadi Rumah Dinas Tipe A 2 unit dan Rumah Dinas Tipe C 6 unit

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0.00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari tidak terdapat Revaluasi terhadap Aset Tetap Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2021 ini

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp19,413,252,443

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.19,413,252,443 dan Rp.23,541,757,225. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	19,452,286,463
Diterima dari Entitas Lain	(60,353,620)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	4,338,100
Pengesahan Hibah Langsung	16,981,500
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	19,413,252,443

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 19,452,286,463, sedangkan DDEL sebesar Rp 60,353,620

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2021

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4,338,100 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Monografi	Badan Urusan Administrasi	85,000
Monografi	Badan Urusan Administrasi	105,000
Network Monitoring System	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	3,026,100
Hub	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1,122,000
Jumlah		4,338,100

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 16,981,500 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2021

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Tety Siti Rochmat Setyawati	Hibah barang berupa 1 Unit AC Split	7,081,500
Umi Kalsum, S.Sos	Hibah barang berupa 1 Unit Hibah barang berupa 1 Unit	4,950,000
M. Ali El Fahmi	Printer	4,950,000
Total Pengesahan		16,981,500.00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		16,981,500

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.35,092,899,254.00 dan Rp.35,765,656,236.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak terdapat Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Tahun Anggaran 2021 ini.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F. 1. KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat Kejadian-Kejadian Setelah Tanggal Neraca yang perlu diungkapkan pada Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu periode Tahun Anggaran 2021 ini.

F. 2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat Pendapatan dan Belanja secara Akrual yang perlu dijelaskan pada Tahun Anggaran 2021.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

Rekening Virtual dengan Nomor Rekening 653244005121000 A.n BPG 016 Pengadilan Tinggi Bengkulu yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.

Nomor Surat Ijin dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara : S-762/PB.3/2021 Tanggal 21 April 2021.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-1 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang Tanggal 21 Maret 2021
2. Revisi DIPA ke-2 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 31 Mei 2021
3. Revisi DIPA ke-3 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 2 Juli 2021
4. Revisi DIPA ke-4 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 13 Agustus 2021
5. Revisi DIPA ke-5 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 25 Agustus 2021
6. Revisi DIPA ke-6 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 14 September 2021
7. Revisi DIPA ke-7 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 1 November 2021
8. Revisi DIPA ke-8 Pergeseran antar Pagu Belanja Barang tanggal 15 November 2021
9. Revisi DIPA ke-9 Penambahan alokasi Pagu Belanja tanggal 30 November 2021
10. Revisi DIPA ke-10 Revisi POK tanggal 03 Desember 2021
11. Revisi DIPA ke-11 Revisi POK tanggal 16 Desember 2021

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai ralat SPM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ralat SPM Nomor 00076 tanggal 22 April 2021, SP2D Nomor 210161301005929 tanggal 26 April 2021 karena adanya kesalahan input uraian SPM
2. Ralat SPM Nomor 00016 tanggal 5 Februari 2021, SP2D Nomor 210161301001007 tanggal 8 Februari 2021 karena adanya kesalahan kode akun
3. Ralat SPM Nomor 00117 tanggal 21 Juni 2021, SP2D Nomor 210161301009549 tanggal 22 Juni 2021 karena adanya kesalahan kode akun
4. Ralat SPM Nomor 00135 tanggal 19 Juli 2021, SP2D Nomor 210161301011259 tanggal 21 Juli 2021 karena adanya kesalahan kode akun
5. Ralat SPM Nomor 00157 tanggal 21 Juli 2021, SP2D Nomor 210161301013114 tanggal 23 Agustus 2021 karena adanya kesalahan kode akun

Informasi mengenai Pengembalian Belanja sebagai berikut :

1. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Akun 511124) sebesar Rp270.000,-
2. Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (Akun 815511) sebesar Rp9.496,-
3. Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (Akun 815511) sebesar Rp11.000,-
4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah untuk Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Akun 523121) sebesar Rp.80
5. Pengembalian sisa Uang Persediaan sebesar Rp21.248,-
6. Pengembalian Sisa Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp60.642.654,-

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Sehubungan dengan tahapan Restrukturisasi Rekening Pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi nomor B-21/Bua.3/KU.03/4/2021 tanggal 12 April 2021 hal Permohonan Cut-off dan Pindahbukuan, maka berkenaan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengajukan penutupan rekening Giro :

Nomor Rekening : 011501001585301

Nama Rekening : BPG 016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Bank : Bank Rakyat Indonesia

Dan telah dipindahbukukan /migrasi ke rekening Virtual Account:

Nomor Rekening : 6532444005121000

Nama Rekening : BPG016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Bank : Bank Rakyat Indonesia

pada tanggal 23 April 2021